



RENCANA AKSI
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayah-Nya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat menyusun Rencana Aksi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk kegiatan Tahun Anggaran 2020 sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Aksi ini merupakan acuan dan konstruksi kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

Rencana Aksi ini memuat perencanaan prognosis per Triwulan di Tahun 2020 kedepan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas yang diemban dalam mewujudkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan mempedomani rencana kerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Rencana Aksi ini mengacu kepada Rencana Aksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020. Diharapkan nantinya hasil Rencana Aksi ini sesuai yang diharapkan sebagaimana target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang ekonomis, efisien dan efektif.

Dengan Rencana Aksi ini, diharapkan peran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat lebih optimal didalam mendukung Rencana Aksi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 didalam peningkatan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya dan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada khususnya.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

Jasmin Ragil Utomo, S.H., MM.

NIP. 19640603 199203 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menyusun Rencana Aksi Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan dan konstruksi kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 secara khusus dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara umum.

Secara umum Rencana Aksi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 2020 menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Aksi Program Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020
2. Rencana Aksi Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan, sebanyak 40 kasus
3. Rencana Aksi Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Sengketa Lingkungan terkait DAS Citarum yang diselesaikan melalui pengadilan, sebanyak 6 kasus
4. Rencana Aksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di Luar Pengadilan berupa : peningkatan kapasitas berjumlah 300 (tiga ratus) orang; Inhouse training 30 (tiga puluh) orang, dan Forum Ahli 150 (seratus lima puluh) orang.
5. Prognosis Capaian Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Per Triwulan dan Per Bulan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Kebijakan Dit. PSLH Tahun 2020	1
D. Ruang Lingkup	2
Bab II RENCANA AKSI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA	
LINGKUNGAN HIDUP	3
A. Struktur Organisasi	3
B. Rencana Aksi Direktorat PHLHK.....	4
C. Rencana Aksi Program Direktorat PSLH	5
D. Rencana Aksi Program Direktorat PSLH Terkait DAS Citarum	6
E. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat PSLH Tahun 2020	6
Bab III PENUTUP	7
LAMPIRAN – LAMPIRAN	8



DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Rencana Aksi Direktorat PHLHK Tahun 2020	4
2	Rencana Aksi Direktorat PSLH Tahun 2020	5
3	Rencana Aksi Direktorat PSLH Terkait DAS Citarum Tahun 2020	5
4	Rencana Aksi Kegiatan Direktorat PHLHK Tahun 2020	6

DAFTAR LAMPIRAN



	Halaman
1	Prognosis Capaian Program, Sasaran dan IKP Per Triwulan Ditjen PHLHK Tahun 2020 9
2	Prognosis Capaian Indikator Kinerja Per Triwulan Ditjen PSLH Tahun 2020 10
3	Prognosis Capaian Indikator Kinerja Per Triwulan Lingkup Ditjen PSLH Tahun 2020 11
4	Prognosis Capaian Indikator Kinerja Per Bulan Lingkup Ditjen PSLH Tahun 2020 12



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan dokumen rencana aksi tahunan dari lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum Tahun 2020. Renaksi ini memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Direktorat PSLH, Ditjen Gakkum KLHK tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman pada pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup oleh Direktorat PSLH baik di Luar Pengadilan maupun Melalui Pengadilan. Rencana Aksi ini ditujukan bagaimana Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat mencapai sasaran dan target sesuai yang ditetapkan.

C. Kebijakan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 84 s/d Pasal 90 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUPPLH dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: 1) bentuk dan besarnya ganti rugi; 2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau 4) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Selain dapat berperan sebagai negosiator dan mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup juga mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang



menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas ini, salah satu instrumen yang digunakan adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Sejauh ini, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan selalu berpedoman pada peraturan perundangan-undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk beracara di pengadilan;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai acuan bagi ahli dalam melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup sebagai dasar tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 meliputi Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020.

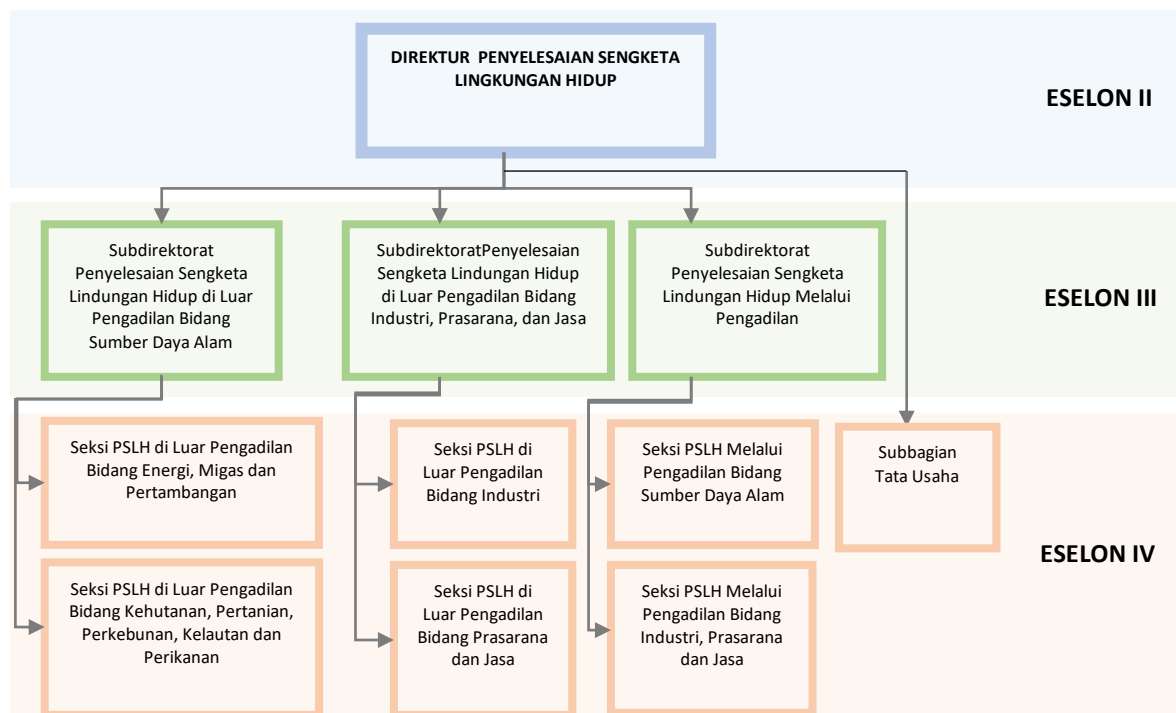
BAB II



RENCANA AKSI DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

A. Struktur Organisasi Dit. PSLH

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bekerja dengan struktur organisasi dalam diagram sebagai berikut ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



B. Rencana Aksi Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

Rencana Aksi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020 sebagaimana Tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Rencana Aksi Direktorat PHLHK Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	IKP	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET
1	2	3	4	5
Terselesainya kasus penegakan hukumbidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pedngadilan	40 Kasus
			Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	6 Kasus
	Jumlah :			46 Kasus

C. Rencana Aksi Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan Tahun 2020

Rencana Aksi Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan Tahun 2020 sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2 : Rencana Aksi Program Direktorat PSLH Tahun 2020



SASARAN PROGRAM	IKP	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET
1	2	3	4	5
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan	10 Kasus
			Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Di luar Pengadilan Bidang SDA	20 Kasus
			Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Di luar Pengadilan Bidang IPJ	10 Kasus
	Jumlah			40 Kasus

D. Rencana Aksi Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Sengketa Lingkungan terkait DAS Citarum yang diselesaikan

Rencana Aksi Program Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Sengketa Lingkungan terkait DAS Citarum yang diselesaikan melalui pengadilan Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3 berikut .

Tabel 3 : Rencana Aksi Program Direktorat PSLH terkait DAS Citarum Tahun 2020



SASARAN PROGRAM	IKP	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET
1	2	3	4	5
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	6 Kasus
	Jumlah :			6 Kasus

- E. Rencana Aksi Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui pengadilan dan di Luar Pengadilan berupa peningkatan kapasitas , Inhouse training, dan Forum Ahli.

Rencana Aksi Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di Luar Pengadilan berupa peningkatan kapasitas , Inhouse training dan Forum Ahli Tahun 2020, sebagaimana Tabel 4 berikut.

Tabel 4 : Rencana Aksi Kegiatan Direktorat PSLH Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	Kegiatan	TARGET
3	2	5
Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas	300 Orang
	In house Training	30 Orang
	Forum Ahli	150 Orang
	Jumlah :	480 Orang



BAB III

PENUTUP

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai Rencana Aksi Tahun 2020 sesuai dengan yang telah ditetapkan adalah guna mendukung tercapainya sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Oleh karena itu rencana aksi ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Rencana Aksi ini digunakan juga sebagai pedoman dalam perencanaan pelaksanaan dan penilaian pengembangan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

Dengan tersusunnya rencana aksi ini diharapkan dapat mendorong pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara khusus untuk tahun 2020 dan mendukung Indikator Kinerja Program (IKP) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga sasaran program penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat terselesaikan sesuai dengan yang ditetapkan untuk tahun 2020 yang sekaligus juga mendukung Tujuan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara umum dapat tercapai.

Semoga Rencana Aksi ini berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Jakarta, Januari 2020

Direktur,

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM.

NIP. 19640603 199203 1 001



LAMPIRAN



I. Prognosis Capaian Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Per Triwulan Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Triwulan				Target 2020	Satuan
	I	II	III	IV		
Persentase pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan meningkat	10	15	30	50	50	Persentase
Jumlah Kasus yang dilakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	15	55	68	35	173	Kasus P-21
Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	400.000	600.000	1.120.000	880.000	3.000.000	Hektar



II. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kinerja Per Triwulan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Triwulan				Target 2020	Satuan
	I	II	III	IV		
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	7	9	10	14	40	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	1	2	2	1	6	Kasus
Jumlah	8	11	12	15	46	Kasus



III. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kinerja Per Triwulan Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Triwulan				Target 2020	Satuan
	I	II	III	IV		
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	3	2	3	2	10	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan Bidang SDA	3	5	5	7	20	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan Bidang IPJ	1	2	2	5	10	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	1	2	2	1	6	Kasus
Jumlah	8	11	12	15	46	Kasus



IV. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kinerja Per Bulan Lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Bulan												Target 2020	Satuan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	-	-	2	-	-	3	-	-	3	-	-	2	10	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan Bidang SDA	1	1	1	-	-	5	-	-	5	-	-	7	20	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan Bidang IPJ	-	1	-	-	-	5	-	-	2	-	-	2	10	Kasus
Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	1	6	Kasus
Jumlah	1	2	4	-	-	15	-	-	12	-	-	12	46	Kasus